

**SEBAGAI INSTITUSI
YANG MANDIRI KEMASLAHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MUTLAK DITENTUKAN OLEH
SATUNYA KATA DENGAN PERBUATAN PEMIMPINNYA**

I. PENDAHULUAN

Akibat dinamika sosial dan politik yang diawali oleh krisis moneter dan ekonomi mulai pertengahan tahun 1997, di satu sisi memberi dampak buruk kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi di sisi lain memberikan hikmah besar kepada POLRI karena berkat tuntutan mahasiswa dalam menggulirkan roda reformasi maka Polri keluar dari ABRI dan dengan terpisahnya Polri dari TNI berarti Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara keamanan dalam negeri melalui penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Perlu menjadi renungan dan instropeksi untuk kajian bahwa dalam setiap pergantian pimpinan Polri senantiasa diawali dengan semangat dan tekad membenahi dan mengembangkan kemampuan Polri, diantaranya melalui pola dasar pembenahan Polri; Rekonfu; Optimasi dan Dinamisasi; Tekadku pengabdian terbaik; Jati diri dan Pelayanan Polri; Tiga penampilan Polri dan 6 (enam)

Pro dan 3 (tiga) K.

Namun realita yang terjadi semakin hari Polri makin terpuruk dan citranya hancur di hati masyarakat, karena justru terkesan oknum Polri berhimpit dengan para penjahat dan kolusi dalam memanipulasi dana masyarakat melalui jaringan perjudian, penyelundupan, Narkoba, komputerisasi administrasi SIM/STNK dan nomor bantuan mobil mewah serta percaloan urusan personil, ironisnya juga terjadi KKN dalam pengadaan Matfasjasa dan Ruilslag asset Polri. Polri saat ini mempunyai Pemimpin yang punya **“visi luhur yakni ingin mewujudkan kemaslahatan POLRI”**, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Commander's Wish di depan para Perwira Tinggi Mabes Polri pada tanggal 15 Januari 2000. Kalimat lengkapnya adalah **“kemaslahatan POLRI adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemaslahatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kemaslahatan Umat Manusia”**. Bila kata-kata **“kemaslahatan POLRI”** kita beri arti menurut

padanan kata dalam Kamus, kata-kata itu bisa berarti; kebaikan Polri, atau kegunaan Polri, atau kepentingan Polri, dan kalau kata-kata itu kita renungkan makna nilai yang dikandungnya, maka “kemaslahatan POLRI” mengandung makna dan nilai yang sangat universal sehingga bisa dipakai sebagai tolok ukur pada setiap fungsi, tugas dan tanggung jawab Polri.

Dengan diamanatkannya “visi” luhur tersebut oleh Pimpinan Polri, maka secara institusional akhirnya menjadi kewajiban bagi seluruh anggota Polri untuk melakukan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk mewujudkannya. Menurut penulis **“kemaslahatan Polri adalah isu strategis yang berkaitan dengan harapan Masyarakat, Bangsa dan Negara untuk memiliki Polri yang maslahat”** yang telah ditangkap secara cermat dan selanjutnya dijadikan visi dan misi bagi seluruh Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri. Kalau anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri mau berkata jujur, makna “Visi luhur” dan/atau harapan Masyarakat, Bangsa dan Negara tersebut adalah sudah merupakan bagian dari makna dan nilai luhur yang sudah tersirat dan tersurat dalam TRIBRATA dan CATUR PRASATYA POLRI.

Hal yang menarik untuk direnungkan atau dikaji lebih mendalam oleh seluruh Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri, adalah upaya yang perlu dan wajib dilakukan oleh Polri guna mewujudkan “visi luhur” tersebut. Penulis yakin “visi luhur” tersebut akan bisa diwujudkan oleh

Polri, kalau Polri berani melakukan perbaikan yang dipersyaratkan. Prasyarat yang diperlukan untuk mewujudkan “visi luhur” Kapolri tersebut di depan menuntut keberanian Polri, Bangsa dan Negara untuk melakukan perbaikan dalam aspek Kepemimpinan di lingkungan organisasi Polri, dengan asumsi bahwa, “kurang baiknya citra Polri saat ini adalah akibat dari kekeliruan yang diperbuat oleh “oknum Pimpinan Polri akibat dari kurang baiknya Kepimpinan dalam organisasi Polri”, asumsi ini sejalan dengan makna pribahasa “guru kencing berdiri murid kencing berlari”.

Implikasi strategis dari; “visi luhur” Kapolri, dan makna pribahasa di depan dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan “visi luhur” Kapolri yakni mewujudkan kemaslahatan Polri”, adalah “para Pemimpin di lingkungan Organisasi Polri harus maslahat terlebih dahulu sehingga bisa memberi teladn yang baik kepada para staf dan para anggota Polri yang ada di bawahnya dan masyarakat pada umumnya”, hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap berlakunya ungkapan yang menyatakan bahwa “ikan itu busuk dimulai dari kepalanya”.Pemikiran ini penulis landasi dengan asumsi : bila para pemimpin di lingkungan organisasi Polri maslahat (baik) maka bawahannya sedikit peluangnya untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, di sisi lain, pada hakekatnya semua orang mempunyai sifat baik dan menyukai kebaikan”. Kalau asumsi ini

bisa diterima oleh seluruh anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri, maka visi luhur Kapolri yakni mewujudkan kemaslahatan Polri akan bisa diwujudkan oleh Polri.

II. KEPEMIMPINAN DAN KEMASLAHATAN POLRI.

Dalam era Reformasi, Demokratisasi, serta penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini, Polri perlu melakukan koreksi dan perbaikan dalam aspek Kepemimpinan di lingkungan Polri agar mampu mewujudkan "visi luhur" Kapolri, dan sesuai dengan era yang sedang dan akan berlangsung. Menurut penulis, dalam proses pelaksanaan reformasi dan demokratisasi akan cenderung menuntut model Kepemimpinan yang bernuansa "demokratis", dan dalam proses penegakan hukum dan HAM akan cenderung menuntut model Kepemimpinan yang bernuansa "persuasif" yang taat asas dan taat hukum. Perubahan model Kepemimpinan tersebut akan cenderung merupakan tuntutan pada segala bidang dan segala jenis Lembaga atau Institusi di Indonesia. Bagi Polri tuntutan model-model Kepemimpinan tersebut harus direspon secara cermat dan arif, sehingga Polri dapat menempatkan diri secara tepat pada berbagai fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dipikul oleh Polri, dan citra Polri yang kurang baik selama ini segera berubah menjadi "kemaslahatan Polri".

Indikasi yang perlu segera direspon

oleh Polri dalam rangka mewujudkan "visi luhur" Kapolri saat ini, adalah indikasi masih adanya beberapa Pejabat Strategis di lingkungan Organisasi Polri yang tidak taat asas dan tidak taat hukum atau kualitas mental dan perilaku mereka menyimpang dari makna yang tersirat dan tersurat dalam TRIBRATA dan CATUR PRASATYA POLRI. Adanya indikasi tersebut bisa dicermati atau dilacak kembali melalui beberapa kasus yang belum bisa diselesaikan oleh Polri, contohnya adalah kasus : Tanjung Priok; 27 Juli 1996, Udin, Marsinah, Mobil Timor; NARKOBA, Biaya siluman dalam pengurusan SIM dan STNK, Perjudian, Penyelundupan, KKN di lingkungan Mabes Polri, dan lain sebagainya. Seandainya para Pejabat Strategis yang membidangi penanganan masing-masing contoh kasus di atas taat asas dan taat Hukum atau tidak berperilaku menyimpang dari TRIBRATA dan CATUR PRASATYA POLRI, penulis yakin kasus tersebut sudah dapat diselesaikan oleh Polri. Bila indikasi tersebut di atas tidak segera direspon oleh Kapolri dan/atau Menteri Pertahanan dan/atau Presiden RI, maka Pejabat yang dimaksud akan memperburuk citra Polri atau "laksana duri dalam daging".

Kalau Polri ingin memperbaiki citra dan mewujudkan kemaslahatan Polri, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, indikasi seperti di atas perlu dan harus segera direspon atau dicermati secara serius. Dalam hal ini, Pimpinan Polri atau bila perlu Presiden

RI melalui Menteri Pertahanan perlu segera merumuskan, menerbitkan, dan memperlakukan kebijakan yang memungkinkan dilakukannya program dan prosedur penelitian atau investigasi ulang yang cermat terhadap penyelesaian kasus-kasus yang belum terselesaikan dan/atau yang menyebabkan rusaknya citra Polri. Kebijakan (keputusan atau instruksi) tersebut dipandang perlu, guna memberi kepastian hukum kepada para pelaksana penelitian atau investigasi dan untuk menghindari fitnah yang bisa merugikan pihak tertentu dan/atau Anggota Organisasi Polri.

Apabila dalam era reformasi, demokratisasi, penegakan hukum dan HAM saat ini pucuk Pimpinan Polri tidak melakukan pembenahan di dalam organisasi dan Kepemimpinan Polri, maka keberadaan Polri akan tetap menjadi salah satu penyebab munculnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia. Untuk mengawali pembenahan yang dimaksud, Pimpinan Polri dan/atau Presiden RI melalui Menteri Pertahanan perlu keberanian untuk melakukan tindakan tegas (memberikan penghargaan dan/atau hukuman) terhadap anggota Polri, misalnya menonaktifkan / memberhentikan anggota Polri atau Pejabat di lingkungan organisasi Polri yang diduga dan dapat dibuktikan berperilaku menyimpang dari aturan yang diberlakukan di lingkungan organisasi Polri. Tanpa adanya keberanian melakukan pembenahan yang bersifat

fundamental di dalam organisasi dan Kepemimpinan Polri, maka keluhan atau opini negatif dari anggota masyarakat terhadap Polri akan sulit dihentikan dan Polri akan sulit juga untuk mewujudkan "visi luhur" yang diamanatkan oleh Kapolri.

Hal ini dikaitkan dengan pernyataan Presiden RI Gus Dur pada saat kunjungan di Pangkalan Brimob Kelapa Dua hari Kamis tanggal 2 Maret 2000, yang menegaskan bahwa kekuatan Polri dan Brimob diarahkan mencapai kekuatan 600.000 orang (0,3% dari jumlah penduduk Indonesia).

III. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEMASLAHATAN POLRI.

Sesungguhnya "kemaslahatan Polri" bukanlah tugas dan tanggung jawab Polri secara mutlak untuk mewujudkannya, tetapi anggota masyarakatpun harus ikut berpartisipasi dalam proses pencapaian kemaslahatan Polri yang dimaksud, mengingat kemaslahatan Polri adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemaslahatan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dari anggota masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa Polri tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan Polri. Asumsi penulis, bila anggota masyarakat tidak mau ditertibkan atau selalu membuat kekacauan atau tidak mau mentaati aturan hukum yang berlaku, maka Polri akan tetap seperti telur diujung tanduk, maksudnya; kalau Polri melakukan pemaksaan atau kekerasan dalam membuat ketertiban

di masyarakat maka akan dinyatakan sebagai pelanggar HAM, di sisi lain, kalau Polri tidak mampu mewujudkan ketertiban maka anggota masyarakat akan mengatakan bahwa Polri tidak mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

Untuk menarik partisipasi anggota masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan Polri, peluangnya sangat besar dan terbuka lebar, mengingat semua warga negara Indonesia punya sifat baik dan menyukai kebaikan, hal ini dapat dibuktikan secara hitam di atas putih dimana semua warga Negara Indonesia menyatakan diri sebagai penganut agama tertentu atau Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun ada orang yang berperilaku buruk atau menyimpang dari aturan hukum dan norma yang berlaku, hal tersebut cenderung bersifat sementara atau cenderung diakibatkan oleh pengaruh lingkungannya. Dalam konteks ini, kalau Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Negeri Sipil Polri taat asas dan taat hukum serta memberikan teladan yang baik kepada anggota masyarakat, maka mereka akan enggan untuk berperilaku yang melanggar aturan hukum atau norma yang berlaku. Sebaliknya, kalau Polri tidak taat asas dan hukum serta tidak memberikan teladan yang baik kepada anggota masyarakat, maka pribahasa yang berbunyi guru kencing berdiri murid kencing berlari akan berlaku dalam konteks ini.

Konsekuensi logis dari mengikut

sertakan anggota masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan Polri, bagi "oknum" Polri tertentu (oknum Polri yang suka berperilaku menyimpang) adalah laksana senjata makan tuan atau seperti menggali kuburan sendiri. Tetapi seperti yang telah diuraikan di atas, Polri tidak akan bisa mewujudkan kemaslahatan Polri tanpa partisipasi aktif yang positif dari anggota masyarakat. Dalam hal ini, kalau Polri benar-benar konsekuen, konsisten dan bertekad bulat untuk mewujudkan kemaslahatan Polri, maka seluruh anggota dan Pegawai Negeri Sipil Polri perlu menetapkan pilihan yang terbaik dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan.

Anggota masyarakat akan senang bila Polri kita maslahat karena merupakan bagian dari kemaslahatan mereka, dan sebaliknya anggota masyarakat akan selalau mencela dan selalau menganggap Polri sebagai penyebab munculnya biaya sosial yang mereka tanggung kalau Polri tidak segera melakukan perbaikan di dalam Kepemimpinan Organisasi Polri. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam era reformasi, demokratisasi, serta penegakan hukum dan HAM saat ini, seluruh Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Negeri Sipil Polri tidak punya pilihan lain selain selalau berpikir dan mencari hal-hal yang baik untuk kemaslahatan Polri dan melaksanakan hal-hal yang baik tersebut dengan cara yang terbaik juga.

IV.KEBATILAN DAN KEMASLAHATAN POLRI.

Boleh percaya boleh tidak, bahwa “pada suatu saat kebaikan akan menang melawan kebatilan karena Tuhan menyukai kebaikan dan membenci kebatilan”, walaupun dalam hidup kita ini banyak dan sering kita jumpai adanya kebatilan, sesungguhnya hal itu adalah “ujian” dari Tuhan kepada kita dan/atau umatnya. Di sisi lain, sesuai dengan kodratnya bahwa semua orang menyukai kebaikan atau umum disebut dengan sebutan “teori Y dari McGregor”, maka kita harus optimis bahwa pada suatu saat kemaslahatan Polri akan terwujud karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemaslahatan; setiap orang, Bangsa dan Negara Kesatuan RI, serta umat manusia.

Apabila kita dan/atau Polri percaya dan setuju dengan pernyataan dalam uraian di atas, maka kita dan/atau Polri perlu mengerahkan seluruh kemampuan agar mampu “menjawab 2 (dua) permasalahan berat yang harus dijawab oleh Polri”. Permasalahan yang dimaksud adalah siapakah sebenarnya musuh-musuh kemaslahatan Polri selama ini?, dan bagaimanakah caranya mengalahkan musuh-musuh kemaslahatan Polri tersebut?. Dua permasalahan ini sesungguhnya adalah merupakan permasalahan yang sudah lama diketahui oleh Polri, tetapi sampai sekarang belum bisa dijawab oleh Polri. Penulis yakin bahwa seluruh Anggota dan Pegawai Negeri Sipil Polri tahu penyebabnya, kalau mereka

mau menanyakan kepada hati nuraninya masing-masing.

Contoh musuh kemaslahatan Polri, dapat kita kelompokkan menjadi 2 (dua) yakni : musuh yang nampak dan musuh yang tidak nampak. Musuh kemaslahatan Polri yang nampak adalah kejadian-kejadian yang dapat ditangkap pancaindra, perwujudannya dapat berupa kejadian: Pembunuhan, Pencurian, Perampokan, Penganiayaan, Penipuan, Kerusuhan, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang secara nyata telah : meresahkan anggota masyarakat, menambah biaya sosial yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat, mengancam ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Sedangkan musuh kemaslahatan Polri yang tidak nampak adalah segala sesuatu hal-hal yang berpotensi menyebabkan munculnya musuh-musuh nyata kemaslahatan Polri, indikasinya tercermin pada cara Polri berfikir dan memandang: Perubahan kondisi sosial dan politik, Kapasitas mental Polri, Pendidikan anggota masyarakat. Konsep pelayanan Polri, Kemampuan Polri merespon perubahan dan akar permasalahan, Persepsi dan pengalaman anggota masyarakat terhadap Polri, Inovasi, dan produktivitas Polri, Tersumbatnya saluran komunikasi dan lain sebagainya.

Apabila kita renungkan dan kita cermati secara mendalam, tentang bagaimana cara menjawab berbagai contoh permasalahan di atas,

mekanismenya adalah seperti yang telah penulis uraikan di depan, yakni: Polri harus selalu berfikir dan mencari hal-hal baik bagi Polri dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan cara yang baik pula. Makna kata “baik” disini adalah baik menurut situasi dan kondisi yang sedang dan akan berlangsung atau baik menurut tuntutan perubahan. Oleh karena itu, marilah kita sadar bahwa tidak ada jawaban yang pasti dari masing-masing contoh permasalahan di atas akibat adanya perubahan, harapan, keinginan, dan kebutuhan pihak-pihak yang dilayani oleh Polri. Menurut penulis, agar Polri mampu mengalahkan musuh-musuh tersebut di atas, maka “musuh dalam selimut atau duri dalam daging Polri” harus dibersihkan dulu. Bagaimana pendapat pembaca?

V. KESIMPULAN.

1. Kita perlu bersyukur karena telah memiliki Pucuk Pimpinan Polri yang punya visi luhur yakni ingin mewujudkan kemaslahatan Polri, Bangsa, dan Negara Kesatuan RI serta umat manusia. Kalau kita cermati kemaslahatan Polri adalah unsur strategis yang berkaitan dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara untuk memiliki Polri yang maslahat. Untuk mewujudkan kemaslahatan Polri, Polri harus berani melakukan perbaikan yang dipersyaratkan, contoh para Pemimpin di lingkungan organisasi Polri harus maslahat terlebih dahulu sehingga bisa memberi teladan

yang baik kepada para staf dan para anggota Polri yang ada di bawahnya serta anggota masyarakat.

2. Polri perlu melakukan koreksi dan perbaikan dalam aspek Kepemimpinan di lingkungan Polri, misalnya dalam merespon indikasi tentang masih adanya beberapa Pejabat Strategis di lingkungan Organisasi Polri yang tidak taat asas dan tidak taat hukum atau kualitas mental dan perilaku mereka menyimpang dari makna yang tersirat dan tersurat dalam TRIBRATA dan CATUR PRASATYA POLRI. Pimpinan Polri atau bila perlu Presiden RI perlu segera merumuskan, menertibkan dan memberlakukan kebijakan yang memungkinkan dilakukannya program dan prosedur penelitian atau investigasi ulang yang cermat terhadap penyelesaian kasus-kasus yang belum terselesaikan dan / atau yang menyebabkan rusaknya citra Polri. Pimpinan Polri dan/atau Presiden RI perlu keberanian mengambil tindakan tegas, misalnya menonaktifkan / memberhentikan Anggota Polri atau Pejabat di lingkungan Polri yang diduga dan dapat dibuktikan berperilaku menyimpang dari aturan yang diberlakukan di lingkungan organisasi Polri dalam rangka pembenahan yang bersifat fundamental di dalam organisasi Polri.

3. Penegasan Presiden RI Gus Dur untuk mengembangkan kekuatan personil Polri / Brimob menjadi 600.000 orang merupakan tantangan tersendiri bagi Polri cq. Pimpinan Polri

dalam pembinaan organisasi dan managemennya. Karena saat ini pembinaan ke dalam tubuh Polri sendiri justru yang perlu mendapat perhatian.

4. Semua warga negara Indonesia punya sifat baik dan menyukai kebaikan, maka apabila Polri taat asas dan taat hukum serta memberikan teladan yang baik kepada anggota masyarakat, maka kemaslahatan Polri akan lebih berpeluang untuk diwujudkan. Polri tidak akan bisa mewujudkan kemaslahatan tanpa partisipasi aktif yang positif dari anggota masyarakat, oleh karena itu dalam era reformasi, demokratisasi, serta penegakan hukum dan HAM saat

ini, seluruh Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Negeri Sipil Polri tidak punya pilihan lain selain selalu berpikir dan mencari hal-hal yang baik untuk kemaslahatan Polri, Bangsa dan Negara Kesatuan RI, dan umat manusia serta melaksanakan hal-hal yang baik tersebut dengan cara yang terbaik juga.

5. Jiwa, semangat dan tekad pengabdian dengan dilandasi “Satunya Kata dengan perbuatan yang jujur dan adil dari seorang Pemimpin” pada akhirnya akan menang melawan konspirasi kebatilan, kemungkaran, dan kemunafikan yang selama ini berlangsung.